



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jl. Letkol Slamet Wardoyo 43-45, Citrodiwangsan Telp. (0334) 881606

LUMAJANG



KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu bulan dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Lumajang, Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS

KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN



MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.

NIP. 19731118 199303 1 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM	3
D. DASAR HUKUM.....	6
E. SISTEMATIKA.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	16
B. REALISASI ANGGARAN	66
BAB IV P E N U T U P.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berfungsi untuk mengetahui



kemampuannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a) Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Menjadikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis;
- c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan



- beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
- d) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
 - e) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif - efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

a. Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Di samping itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

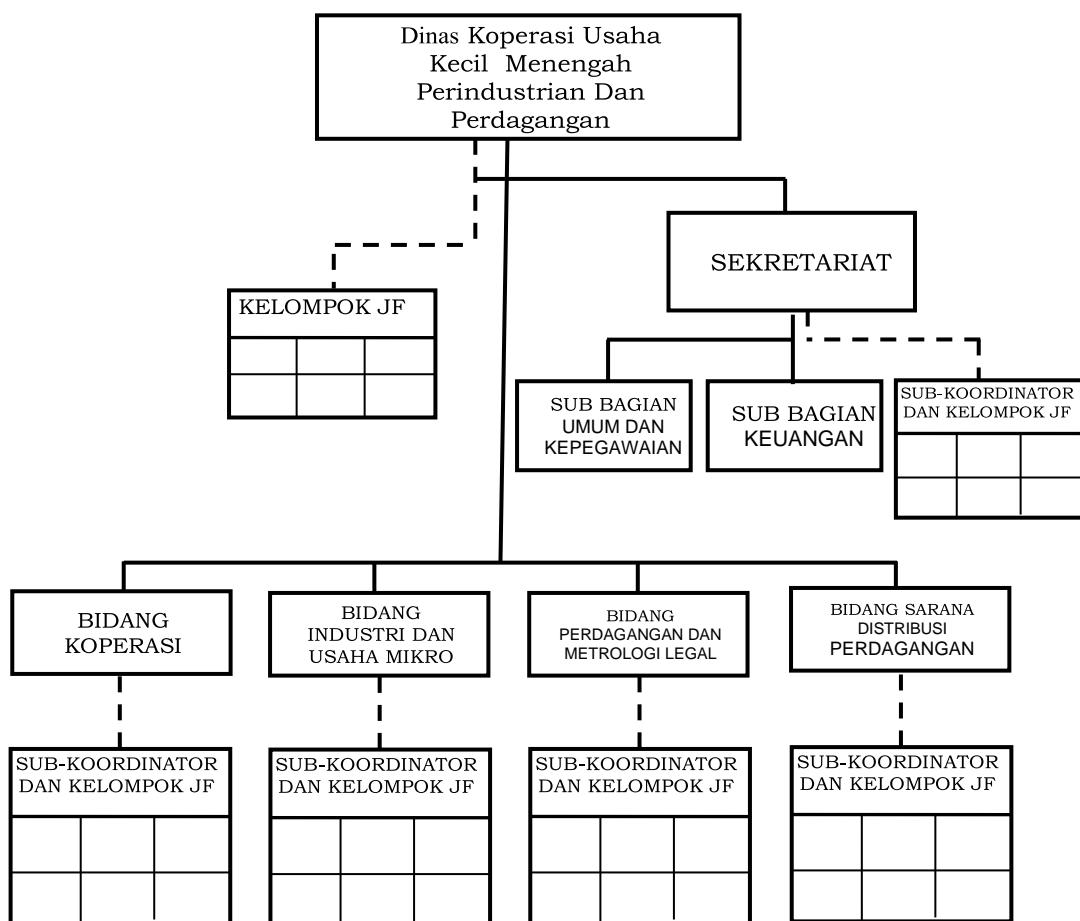
- a) perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- b) pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta



- sarana distribusi perdagangan;
- d) pelaksanaan administrasi bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 11 Tahun 2022 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

b. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 263 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 80 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 178 orang, Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang, dan Petugas Pendamping Koperasi sebanyak 2 orang.



Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan TKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember 2022

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS	TKK	PPKL	Pendamping		
1.	SD	1	10			11	4,18
2.	SMP	2	15			17	6,46
3.	SMA/SMK	47	112			159	60,46
4.	D1	-	-			0	0,00
5.	D2	-	3			3	1,14
6.	D3	2	1			3	1,14
7.	D4/S1	23	36	3	2	64	24,33
8.	S2	5	1			6	2,28
J U M L A H		80	80	178	3	2	263

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang proporsi paling banyak adalah lulusan SMA/SMK sebanyak (60,46%) diikuti D4/S1 (24,33%), SMP (6,46%), SD (4,18%), S2 (2,28%), D3 (1,14%), D2 (1,14%) dan yang paling kecil D1 (0%).

Jumlah pegawai per unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang per Desember 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Per Desember 2022

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat	35	
2	Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal	22	
3	Bidang Usaha Mikro dan Industri	13	
4	Bidang Koperasi	15	
5	Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	178	
	JUMLAH	263	

Dilihat dari Pegawai Per Unit Kerja dapat dijelaskan bahwa



Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang jumlah pegawai yang paling banyak yaitu pada bidang Sarana Distribusi Perdagangan termasuk pegawai dari pasar yang menyebar di 15 kecamatan yang terdiri 30 pasar.

c. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi



- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 21. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
 22. Peraturan Bupati Lumajang No. 11 Tahun 2022 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

d. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Adapun Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan ;
2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi



- alternatif yang telah dilakukan ;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
 4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.;
- B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Perubahan Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Rp	187.163.473.963
2. Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp	10.386.052.733.457
3. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp	3.354.259.412.080
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	4.838.025.215.520
5. Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Rp	21.843.136,20

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018-2023

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai



wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a. Adanya revisi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, sehingga adanya Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) pada pertengahan tahun melalui Perubahan APBD

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Rp	187.163.473.963
2. Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp	10.386.052.733.457
3. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp	3.354.259.412.080
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	4.838.025.215.520
5. Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Rp.	21.843.136,20

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan serta anggaran tahun 2022 berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	23.761.066.839
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.156.782.089
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.591.250



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.330.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.190.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	871.250
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.117.600.319
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.069.486.319
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.330.000
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.784.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.756.000
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.756.000
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	5.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.514.070
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.020.090
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.661.330
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.112.050
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	4.560.600
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.160.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.999.970
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.999.970
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.239.402.280
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.035.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.612.080
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	911.755.200
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.918.200



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.868.200
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.050.000
1.8.3	Pemeliharaan Aset tak berwujud	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
II	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.400.000
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.400.000
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.400.000
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000
III	Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi	75.360.000
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.360.000
31.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	52.800.000
31.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.560.000
IV	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	404.200.000
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	404.200.000
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000
V	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	14.999.850
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.999.850
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.850
VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	12.077.324.900
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12.077.324.900



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.077.324.900
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.138.142.000
VII	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.591.900.000
7.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.888.900.000
7.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.564.900.000
7.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.324.000.000
7.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	703.000.000
7.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	703.000.000
VIII	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	37.690.000
8.1	Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/ Kota	7.690.000
81.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barangdalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.090.000
8.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.600.000
8.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000
8.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000
IX	Program Pengembangan Ekspor	179.980.000
9.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	179.980.000
9.1.1	Pameran Dagang Nasional	100.000.000
9.1.2	Pameran Dagang Lokal	60.000.000
9.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	19.980.000
X	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	163.572.000
10.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan	163.572.000
10.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	146.572.000
10.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.000.000
XI	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	165.000.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
11.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	165.000.000
11.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120.000.000
11.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	45.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.458.262.866
XII	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.434.033.116
12.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6.434.033.116
12.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	75.000.000
12.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	329.999.480
12.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	27.000.000
12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.037.008.786
XIII	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	15.749.750
13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.749.750
13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	15.749.750
13.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0
XIV	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.480.000
14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	8.480.000
14.1.1	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8.480.000
JUMLAH		35.357.471.705



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

a. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan

Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan



tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	: Sangat Baik
70 \leq x < 85	: Baik
55 \leq x < 70	: Cukup Baik
x < 55	: Kurang Baik

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feedback* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian



tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2022. Capaian indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi s.d Triwulan IV	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	187.163.473.963	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
2.	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.386.052.733.457	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.354.259.412.080	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.838.025.215.520	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
5.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	21.843.136,20	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan IV Tahun 2022 (Data diolah)

Adapun Program / Kegiatan / Sub Kegiatan penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 16%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 27%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 71%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 100%

Pada program ini melaksanakan program rutin sekretariat yang merupakan pendukung bagi kegiatan teknis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Sehingga total capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%. Prosentase pencapaian kinerja tersebut sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.



1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	:	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Target Kinerja Tahun 2022	:	100%
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	38%
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	19%
Realisasi Kinerja s.d. Tw III 2022	:	81%
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	:	106%

Pada kegiatan ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, baik itu triwulan maupun semester, sehingga pada tiap – tiap triwulan melaksanakan penyusunan dokumen yang sama dengan periode yang berbeda. Adapun sampai dengan triwulan IV sudah menghasilkan 17 dokumen antara lain penyusunan dokumen P-Renstra 2019 - 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 2, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 3, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 4, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan 2, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan 3, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan 4, Laporan E-81 Triwulan I, Laporan E-81 Triwulan 2, Laporan E-81 Triwulan 3, Laporan E-81 Triwulan 4 dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, RKA Tahun 2023.

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Kinerja Tahun 2022	:	2 dokumen
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	1 dokumen
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	0 dokumen
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	:	3 dokumen
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	:	3 dokumen



Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen P-Renstra 2019 - 2023. Akan tetapi penyusunan sudah dilaksanakan pada Triwulan I, sedangkan realiasasi sampai dengan Triwulan IV yaitu dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 sehingga realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 dokumen.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2023 yang dilaksanakan di Triwulan IV.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 5 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 4 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 5 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2022. Jadi jumlah realisasi sampai dengan triwulan IV 2022 adalah 5 laporan.



1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 8 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 2 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 6 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 8 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja, Berupa Survey Kepuasan Masyarakat tiap triwulan pada Tahun 2022 dan evaluasi kinerja triwulan yang tertuang dalam form E – 81, sehingga realisasi sampai dengan triwulan IV yaitu 8 laporan.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 25%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 25%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 75%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 100%

Kegiatan ini melaksanakan penyusunan seluruh dokumen keuangan yang terdiri dari laporan harian, bulanan, tribulan, semester dan tahunan. Dan juga dokumen yang berupa pengajuan SPJ kegiatan rutin dengan perinciannya hingga menjadi SP2D.

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Target Kinerja Tahun 2022 : 100 orang / 12 bulan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 98 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 98 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 94 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 84 orang



Sub kegiatan ini melaksanakan penyerapan anggaran gaji untuk seluruh ASN yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan termasuk tunjangan tambahan penghasilan pegawai dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. Realisasi triwulan IV lebih sedikit dari triwulan sebelumnya dikarenakan 5 orang mutasi keluar, 3 orang pensiun dan 2 orang meninggal dunia.

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 9 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 12 dokumen

Sub kegiatan ini melaksanakan belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen dan pengelola keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 9 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 12 dokumen

Sub kegiatan ini melaksanakan penatausahaan rutin sub bagian keuangan yaitu proses verifikasi pada dokumen pengajuan SPJ.



1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 14%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 14%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 60%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 100%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah yang dilakukan secara berkala, baik triwulan maupun semester.

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi pengamanan Barang Milik Daerah, berupa proses penyertifikatan tanah milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan serta pengamanan aset yang sedang dalam sengketa.

1.3.2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik

Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 4 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 4 laporan



Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi BMD yang berada di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Kantor Bidang Metrologi Legal serta 29 pasar yang dilaksanakan secara berkala / triwulan.

1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 25%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 25%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 75%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 100%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yaitu dari jasa pelayanan pasar dan jasa pelayanan tera – tera ulang yang dilaksanakan secara berkala, baik bulanan, triwulan dan semester.

1.4.1 Penetapan Wajib Retribusi Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah

Target Kinerja Tahun 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 2 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penerbitan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) sesuai dengan ijin yang sudah disetujui dan STS Perijinan.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 32%



Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 67%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 101%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi administrasi umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan/material, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 paket

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 paket

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 1 paket

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan komponen – komponen instalasi listrik yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar.

1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 3 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 paket

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 paket

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 4 paket

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 4 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan belanja alat – alat kebersihan, bahan pembersih, ATK, benda pos, dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.



1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 2 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 paket

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 paket

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 2 paket

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 3 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

1.5.4 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 paket

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 paket

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 1 paket

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan bahan / material khususnya pada pengisian APAR yang akan ditempatkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target Kinerja Tahun 2022 : 90 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 30 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 57 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 90 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa fasilitasi makan dan minum rapat,



perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 100%

Pada kegiatan ini melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Unit peralatan kantor yang disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 unit

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 unit

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 unit

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan kantor berupa pengadaan kamera dan perlengkapannya sebagai penunjang dokumentasi kegiatan kantor.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 25%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 25%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 75%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 100%

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang menujung urusan penyedian jasa operasional kantor.



1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 9 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 12 laporan

Pada sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa pengiriman jasa paket, penggandaan surat dan Perjalanan dinas dalam daerah.

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 9 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 12 laporan

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan kegiatan belanja rutin untuk pembayaran tagihan rekening listrik, rekening air, rekening telepon, rekening internet untuk kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, kantor bidang metrologi legal dan pasar – pasar daerah.

1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 9 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 12 laporan



Pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum ini melaksanakan pembelanjaan untuk gaji tenaga kontak bulanan, pembayaran BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan kematian.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD

Target Kinerja Tahun 2022 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 24%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 24%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 73%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 100%

Pada Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Target Kinerja Tahun 2022 : 83 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 2 unit

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 10 unit

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 67 unit

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 83 unit

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan.

1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang



Dipelihara

Target Kinerja Tahun 2022	: 134 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2022	: 10 unit
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: 36 unit
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: 96 unit
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: 134 unit

Pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini merupakan pemeliharaan ac, server, computer, printer, dan laptop.

1.8.3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Indikator Kinerja	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
-------------------	--

Target Kinerja Tahun 2022	: 1 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2022	: 0 unit
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: 0 unit
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: 1 unit
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: 1 unit

Pada sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ini berupa Pengembangan Aplikasi SI DILAN yang telah dilaksanakan pada triwulan III.

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab
-------------------	---

Target Kinerja Tahun 2022	: 1 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2022	: 0 unit
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: 0 unit
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: 1 unit
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: 1 unit

Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini berupa rehabilitasi gedung kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan yang dilaksanakan pada triwulan IV.

Pada Program / kegiatan penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan ini merupakan program dan



kegiatan yang melekat pada sekretariat dan hampir keseluruhan capaian kinerja 100%.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

II. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Indikator Kinerja	:	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Target Kinerja Tahun 2022	:	82%
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	43%
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	0%
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	:	106%
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	:	136%

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 82%. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV adalah 136%. Prosentase realisasi kinerja di atas 82% merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah koperasi yang berRAT ditahun berikutnya, maka koperasi yang belum melaksanakan RAT ditahun ini dilakukan pengawasan secara maksimal dan sebanyak mungkin sebagai support agar melaksanakan RAT ditahun depan.

2.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja	:	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi
Target Kinerja Tahun 2022	:	35 koperasi
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	15 koperasi
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	0 koperasi



Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 37 koperasi

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 58 koperasi

Dilaksanakannya Pengawasan/Pemeriksaan Koperasi, diharapkan pengelolaan Koperasi di Kabupaten Lumajang bisa lebih baik, yang memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 berjumlah 58 koperasi.

2.1.1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 35 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 15 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 unit usaha

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 37 unit usaha

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 58 unit usaha

Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi . Sedangkan pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 58 koperasi yang diawasi kesehatannya.



2.1.2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja

Target Kinerja Tahun 2022 : 250 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 206 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 65 koperasi

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 289 koperasi

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 296 koperasi

Pemeriksaan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Koperasi adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha Koperasi dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau pengenaan sanksi. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sudah melebihi target kinerja tahun 2022 dikarenakan koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejumlah 296 koperasi, dimana RAT merupakan bentuk kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang – undangan.

III. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat

Target Kinerja Tahun 2022 : 81%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 14,29%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 76%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 21%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 21%

Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan



usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Indikator Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi adalah Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat sebesar 81%. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 21%, dikarenakan kepatuhan koperasi dalam pelaksanaan RAT tidak optimal.

3.1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat

Target Kinerja Tahun 2022 : 70 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 koperasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 koperasi

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 18 koperasi

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 18 koperasi

Dilaksanakannya penilaian kesehatan yang dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performa dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, serta penerapan prinsip syariah bagi KSPPS/USPPS. Selain itu, Penilaian Kesehatan Koperasi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri koperasi. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 18 koperasi yang sehat. Realisasi kinerja cukup rendah dikarenakan kesalahan penetapan target kinerja, 70 koperasi adalah untuk koperasi sehat dan cukup sehat.

3.1.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

Target Kinerja Tahun 2022 : 200 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 10 koperasi



Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 54 koperasi
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 75 koperasi
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 75 koperasi
Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, ataupun koperasi lain, wajib mengelola usahanya secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga koperasi senantiasan dalam keadaan “sehat” sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 75 koperasi yang telah dinilai kesehatannya.

3.1.2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan

Target Kinerja Tahun 2022 : 4 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 unit usaha

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 8 unit usaha

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 8 unit usaha

Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota diberikan ke unit usaha koperasi yang telah dinilai kesehatannya. Hal ini sebagai apresiasi koperasi yang menjalankan prinsip koperasi dengan benar dan memiliki pertumbuhan yang aman dan kontinu sekaligus menjadi parameter baru bagi koperasi yang dilaksanakan pada Triwulan III. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yaitu 8 unit usaha koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan antara lain kategori KPRI, KSP, Kopwan dan KSPPS serta Koperasi Lainnya dengan masing - masing 2 pemenang.

IV. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Indikator Kinerja : Persentase Pendidikan Koperasi



Target Kinerja Tahun 2022 : 85%
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 36,42%
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 24,28%
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 60,71%
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 85%

Pendidikan dan latihan perkoperasian adalah salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota tentang besarnya manfaat yang diberikan oleh koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Melalui pendidikan, anggota juga dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai, prinsip-prinsip dan praktik-praktik koperasi. Indikator Program ini adalah Persentase Pendidikan Koperasi sebesar 85%. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 100%.

4.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian

Target Kinerja Tahun 2022 : 280 orang
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 orang
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 120 orang
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 200 orang
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 280 orang

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota, pengurus, pengawas, atau karyawan dalam bidang pengetahuan perkoperasian, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan dan usaha. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 280 orang.

5.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

Target Kinerja Tahun 2022 : 280 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 120 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 200 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 280 orang

Pelatihan koperasi berorientasi pada kinerja, dengan maksud untuk memperbaiki keahlian pekerja sehingga dapat lebih mampu dalam menjalankan tupoksi pekerjaannya sehingga SDM pengelola koperasi memiliki kualitas yang baik, memiliki kemampuan manajemen yang baik serta berwawasan/pegetahuan luas. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 280 orang yang memahami Pengetahuan Perkoperasian.

V. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Target Kinerja Tahun 2022 : 80%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0%

Realisasi Kinerja s.d. Tw III 2022 : 0%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 80%

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan unit usaha lainnya. Indikator Program ini adalah Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 80%. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 80%.

5.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan,



penguatan kelembagaan,
penataan manajemen,
standarisasi dan restrukturisasi
usaha koperasi

Target Kinerja Tahun 2022 : 200 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 200 orang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan fasilitasi untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 200 orang.

5.1.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan

Target Kinerja Tahun 2022 : 200 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 200 orang

Bentuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah pembinaan dan sosialisasi ke Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTREN), dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang UKM dan kewirausahaan bagi SDM yang mengelola Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTREN). Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 200 orang.



VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro

Target Kinerja Tahun 2022 : 75%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 25%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 64%

UMKM merupakan salah satu barometer perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Indikator Program ini adalah Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro sebesar 75%. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 64%.

6.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro

Target Kinerja Tahun 2022 : 210 usaha mikro

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 usaha mikro

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 usaha mikro

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 71 usaha mikro

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 178 usaha mikro

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan merupakan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro yang targetnya sebanyak 210 usaha mikro. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 178 usaha mikro.

6.1.1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima



Pembinaan dan
Pendampingan Terhadap
Usaha

Target Kinerja Tahun 2022 : 210 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 unit usaha

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 71 unit usaha

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 178 unit usaha

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah belanja dana hibah penguatan modal. Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 178 unit usaha karena pengajuan proposal yang masuk harus melalui proses verifikasi lapangan terlebih dahulu dan anggaran menyesuaikan dengan pokir DPRD.

VII. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Nilai retribusi pelayanan pasar

Target Kinerja Tahun 2022 : Rp 8.078.276.300

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : Rp 662.008.400 (Maret - Diskopindag)
Rp 1.954.265.750 (Januari s/d Maret)

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : Rp 1.734.134.320

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022: Rp 5.801.135.263,75

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022: Rp 7.775.324.776,25

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai indikator kinerja nilai retribusi pelayanan pasar dimana setoran retribusi ini merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang dari pemungutan retribusi pelayanan pasar. Adapun target nilai retribusi pelayanan pasar berdasarkan hasil KUA – PPAS tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 8.078.276.300. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Rp 7.775.324.776,25 sehingga total capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 96%.



7.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : prosentase sarana yang dibangun/direhab

Target Kinerja Tahun 2022 : 16,67%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 %

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 %

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 3,33 %

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 13,68%

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai indikator kinerja yaitu prosentase sarana yang dibangun/ direhab, pasar yang direhab/dipelihara antara lain Pasar Nogosari, Pasar MKS, Pasar Pasirian, dan Pasar Baru sehingga realisasi terhadap target sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sebesar 13,68%.

7.1.1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 29 pasar

Salah satu pendukung meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan adalah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Adapun jumlah sarana distribusi perdagangan semula sebanyak 30 pasar menjadi 29 pasar di Triwulan IV dikarenakan peralihan Pasar Artagama menjadi Ruang Terbuka Hijau.

7.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 30 pasar

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 30 pasar



Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 29 pasar
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pasar mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dimana realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah 29 pasar dikarenakan peralihan Pasar Artagama menjadi Ruang Terbuka Hijau.

7.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Indikator Kinerja : Jumlah pengelola pasar yang dibina

Target Kinerja Tahun 2022 : 64 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 64 orang

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 64 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 64 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 64 orang

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya mempunyai indikator kinerja jumlah pengelola yang dibina yang lebih difokuskan ke petugas retribusi pasar dengan tujuan meningkatkan ketelitian dalam perhitungan kembali retribusi yang telah diterima sangat dibutuhkan. Karena sering kali terdapat uang yang sudah tidak layak beredar dalam penarikan retribusi, sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu untuk menghindari pemungutan-pemungutan liar yang sering terjadi. Adapun pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 100% .

7.2.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 dokumen



Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 9 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 12 dokumen

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan merupakan kegiatan monitoring benda berharga di pasar rakyat. Target kinerja pada 2022 yaitu 12 dokumen sedangkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV yaitu 12 dokumen. Sehingga capaian kinerja sudah mencapai 100%.

VIII. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator Kinerja : Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil

Target Kinerja Tahun 2022 : 80%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 93%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 89%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 85%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 78%

Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kegiatan monitoring barang kebutuhan pokok yang harganya stabil yang dihitung berdasarkan koefisien harga antar waktu yaitu 27 komoditi antara lain :

- 1) Beras = 3,07%
- 2) Gula = 3,29%
- 3) Minyak goreng = 8,22%
- 4) Daging (sapi, ayam broiler dan ayam kampung) = 7,26%
- 5) Telur ayam = 8,60%
- 6) Susu (susu kental manis dan susu bubuk) = **12,94%**
- 7) Jagung pipilan = 6,00%
- 8) Garam beryodium = 6,28%
- 9) Tepung terigu = **16,49%**
- 10) Kacang Kedelai = 6,16%
- 11) Mie instan = 4,29%
- 12) Cabe = **33,82%**
- 13) Bawang merah dan putih = **16,98%**, bawang merah =**23,91%**, bawang putih = 10%
- 14) Ikan asin teri = 4,35%
- 15) Kacang hijau = **12,77%**



- 16) Kacang tanah = 2,28%
- 17) Ketela pohon = 3,58%
- 18) Sayur mayur = **14,47%**
- 19) Semen = 0,81%
- 20) Ikan segar = 3,35%
- 21) Kayu balok meranti (4×10) = 0,63%
- 22) Papan meranti(4mx3cmx20mm) = 5,40%
- 23) Triplek (6mm) = 2,06%
- 24) Besi beton (sni murni) = 1,94%
- 25) Paku = 1,39%
- 26) Gas elpigi 3 kg = 0,69%
- 27) Pupuk = 1,39%

Berdasarkan perhitungan tersebut yang koefisien harga antar waktu dibawah 10% sejumlah 21 bahan pokok sedangkan 6 bahan pokok antara lain : susu, tepung terigu, cabe, bawang (merah), kacang hijau, sayur mayur (kol/kubis, tomat). Koefisien harga antar waktu di atas 10% dikarenakan sebelumnya sempat mengalami lonjakan harga di triwulan II dan triwulan III untuk 4 komoditi antara lain cabe, bawang merah, sayur mayur (kol/kubis, tomat) dan pada triwulan IV harga kembali normal. Sedangkan komoditi susu mengalami kenaikan harga dikarenakan dampak dari pandemi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak menyebabkan penurunan produksi susu sedangkan komoditi tepung terigu mengalami kenaikan harga efek kenaikan harga gandum di tengah konflik Rusia-Ukraina dan pelarangan ekspor gandum oleh India, selain itu akibat gelombang panas yang melanda beberapa negara penghasil gandum berakibat banyak negara yang mengalami gagal panen sehingga terjadi penurunan produksi. Secara keseluruhan prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil sebesar 78%.

8.1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja	:	Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan
Target Kinerja Tahun 2022	:	13 barang
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	13 barang
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	13 barang



Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 13 barang

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 13 barang

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota merupakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil secara pemantauan langsung maupun yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Komoditi yang dipantau sejumlah 13 komoditi antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, jagung pipilan, tepung terigu, kacang kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, dan ikan segar. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan ini yaitu 100%.

8.1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 9 laporan

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 12 laporan

Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota merupakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil dan tesedianya data panel/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen (penggilingan), pedagang grosir dan pedagang eceran secara berkala, data tersebut bisa digunakan



sebagai indikator pengambilan kebijakan jika sewaktu-waktu ada ketidakstabilan harga dan pasokan pangan di pasar. Adapun capaian kinerja pada triwulan ini yaitu 12 laporan atau sebesar 100%.

8.1.2 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	:	Jumlah	Laporan
		Pelaksanaan	Operasi
		Pasar Reguler	dan Pasar
		Khusus yang Berdampak	dalam 1 (Satu)
		Kabupaten/Kota	
Target Kinerja Tahun 2022	:	4 laporan	
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	1 laporan	
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	1 laporan	
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	:	2 laporan	
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	:	4 laporan	

Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Sebab, seringkali ada kenaikan harga pada saat terutama pada saat Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan menjelang pergantian tahun. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan di triwulan II dikarenakan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya berupa minyak goreng mengalami kenaikan harga. Sehingga realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV 2022 sebesar 4 laporan.

8.2 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	:	Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi
Target Kinerja Tahun 2022	:	84 kios
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	0 kios
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	42 kios
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	:	42 kios



Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 84 kios

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewaduhan dan pelabelan apakah yang tercantum sesuai dengan yang telah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Jumlah kios sebagai objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi sampai dengan Triwulan IV adalah 84 kios. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

8.2.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Indikator Kinerja	:	Jumlah Pengawasan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan
Target Kinerja Tahun 2022	:	2 laporan	
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	0 laporan	
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	1 laporan	
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	:	1 laporan	
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	:	2 laporan	

Pupuk selalu menjadi masalah krusial dalam usaha tani. Seringkali masalah kelangkaan menjadi momok menakutkan petani menjelang musim tanam. Karenanya, pengawasan harus terus diintensifkan agar pupuk subsidi tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dilaksanakan Triwulan II dan triwulan IV sehingga capaian sampai dengan triwulan IV sebesar 100%.

IX. Program Pengembangan Ekspor

Indikator Kinerja	:	- Nilai Ekspor	
		- Nilai Perdagangan Antar Daerah	
Target Kinerja Tahun 2022	:	- Rp 950.000.000.000	
		- Rp 4.080.000.000.000	
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	Rp 52.892.457.640 (Maret)	



	-	Rp	9.119.085.188 (Maret)
	-	Rp	137.221.581.084 (Januari s/d Maret)
	-	Rp	16.532.272.243 (Januari s/d Maret)
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: -	Rp	73.806.518.520
	-	Rp	15.795.677.371
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: -	Rp	306.151.618.164
	-	Rp	52.990.504.809
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: -	Rp	1.129.658.143.806
	-	Rp	5.694.871.879.432

Ekspor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah negara. Dari kegiatan ekspor sebuah negara akan memperoleh pendapatan. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan. Adapun rekapitulasi nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah ini dapat terlihat sampai dengan triwulan IV 2022 masing-masing sebesar Rp 1.129.658.143.806 dan Rp 5.694.871.879.432.

9.1 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : nilai omset promosi dagang

Target Kinerja Tahun 2022 : Rp 200.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : Rp 0

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : Rp 128.000.000

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : Rp 141.747.000

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : Rp 210.127.000

Salah satu pendukung pertumbuhan nilai perdagangan daerah adalah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dimana indikator kinerja kegiatan ini nilai omset promosi dagang. Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV yaitu Rp 210.127.000 yaitu transaksi misi dagang yang telah dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung komoditi telur asin dan omset promosi dagang di pameran APKASI serta Pameran Jatim Fair Hybrid 2022.

9.1.1 Pameran Dagang Nasional

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha



yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang : 30 pelaku usaha
Target Kinerja Tahun 2022 : 30 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 30 pelaku usaha
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 30 pelaku usaha
Pameran Dagang Nasional berupa pameran produk lokal yang diselenggarakan di tingkat nasional yaitu pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Sehingga realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV 30 pelaku usaha.

9.1.2 Pameran Dagang Lokal

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal
Target Kinerja Tahun 2022 : 30 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 pelaku usaha
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 25 pelaku usaha
Pameran Dagang Lokal berupa pameran produk lokal yang diselenggarakan di tingkat provinsi Jawa Timur antara lain pameran Jatim Fair Hybrid 2022. Kegiatan ini diselenggarakan di Grand City Mall & Convex Surabaya pada bulan Oktober 2022. Ajang Jatim Fair merupakan sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk memotivasi promosi dan meningkatkan transaksi dagang selama dan sesudah pameran sebagai sarana tolak ukur daya saing produk IKM. Sehingga realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV sebanyak 25 pelaku usaha yang lolos kurasi produk untuk diiklantik dalam pameran Jatim Fair Hybrid.



9.1.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan

Target Kinerja Tahun 2022 : 3 pelaku usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 pelaku usaha

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 3 pelaku usaha

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 4 pelaku usaha

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 4 pelaku usaha

Misi dagang adalah kegiatan untuk memperluas pangsa pasar dalam negeri dengan cara mempertemukan antara para penjual dan pembeli potensial dari dua provinsi. Dengan adanya misi dagang, diharapkan hubungan antar pelaku usaha lintas provinsi semakin erat dan pertumbuhan ekonomi semakin naik. Pada tahun 2022 target misi dagang sebanyak 1 kali kegiatan yang telah dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan yang sama, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga turut mengikuti misi dagang dan terjadi proses transaksi sebesar Rp 128.000.000 untuk komoditi telur asin yang telah dilaksanakan pada triwulan II dan misi dagang di Kalimantan yang dilaksanakan di Triwulan III dengan jumlah transaksi sebesar Rp 27.550.000 untuk komoditi susu. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV adalah 4 pelaku usaha.

X. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja : Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang

Target Kinerja Tahun 2022 : 82%

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 7%

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 10%

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 40%

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 41%

Salah satu pendukung meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan adalah program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan indikator kegiatannya adalah prosentase tingkat kepatuhan wajib tera



ulang. Dimana persentase ini didapatkan dari jumlah Wajib Tera Ulang yang telah melaksanakan Tera / tera ulang dibagi dengan potensi Wajib Tera Ulang Kabupaten Lumajang sebanyak 82%, sehingga realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 41%. Prosentase realisasi kinerja masih dibawah target dikarenakan terbatasnya anggaran menjadikan target lokasi pelayanan tera / tera ulang menurun dari tahun sebelumnya sehingga pelayanan difokuskan pada pasar rakyat di masing - masing Kecamatan yang menjadikan cakupan jumlah WTU dan UTTP menjadi berkurang.

10.1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Kinerja	: Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang
Target Kinerja Tahun 2022	: Rp 175.000.000
Realisasi Kinerja Tw I 2022	: Rp 12.785.800 (Maret) Rp31.968.900 (Januari s/d Maret)
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: Rp 56.220.200
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: Rp 103.435.200
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: Rp 161.848.800
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kegiatannya adalah Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang. Dimana capaian sampai dengan Triwulan IV Rp 161.848.800 atau sebesar 92% dari target 2022.	

10.1.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Indikator Kinerja	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
Target Kinerja Tahun 2022	: 18.794 unit
Realisasi Kinerja Tw I 2022	: 1.346 unit (Maret) 2.224 (Januari s/d Maret)
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: 3.334 unit
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: 9.207 unit
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: 9.415 unit



Salah satu pendukung tercapainya pertumbuhan pasar tertib ukur adalah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan indikator jumlah UTTP yang di tera, tera ulang. Dimana realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yaitu 9.415 unit. Realisasi kinerja masih dibawah target dikarenakan terbatasnya anggaran menjadikan target lokasi pelayanan tera / tera ulang menurun dari tahun sebelumnya sehingga pelayanan difokuskan pada pasar rakyat di masing - masing Kecamatan yang menjadikan cakupan jumlah WTU dan UTTP menjadi berkurang.

10.1.2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

Target Kinerja Tahun 2022 : 300 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 83 orang (Maret)

189 orang (Januari s/d Maret)

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 327 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 517 orang

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 519 orang

Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal merupakan kegiatan pendukung dari program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dimana indikator kinerja yaitu Jumlah wajib tera ulang yang diberikan penyuluhan, dengan realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 adalah 519 WTU dikarenakan jumlah objek pada sub kegiatan pengawasan/penyuluhan metrologi legal mengalami peningkatan yang mengindikasikan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pengawasan mandiri terhadap UTTP khususnya yang berada di pasar cukup tinggi.



XI. Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja	:	Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah
Target Kinerja Tahun 2022	:	4%
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	0%
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	0%
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	:	0%
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	:	11%

Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri mempunyai indikator prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah dengan target kinerja pertumbuhan sebesar 4% dari pertumbuhan nilai perdagangan daerah 2021 sebesar Rp 7.033.198.293.037. Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV adalah 11%, seiring pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dan berkurangnya kasus Covid-19 mendorong kenaikan mobilitas masyarakat serta dibukanya sektor ekonomi produktif mendorong pertumbuhan nilai perdagangan daerah. Selain itu

11.1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja	:	Nilai Perdagangan Daerah
Target Kinerja Tahun 2022	:	Rp 7.280.000.000.000
Realisasi Kinerja Tw I 2022	:	Rp 0
Realisasi Kinerja Tw II 2022	:	Rp 0
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	:	Rp 0
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	:	Rp 7.804.667.112.064

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai indikator nilai perdagangan daerah sebesar Rp 7.280.000.000.000. Penguatan daya saing industri dan pengamanan pasar produk dalam negeri sangat diperlukan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendongkrak penggunaan produk-produk dalam negeri, baik melalui program-program promosi seperti sosialisasi produk dalam negeri maupun pameran-pameran, serta mengajak kepada semua pihak agar terus memberikan dukungan untuk meningkatkan daya saing melalui optimalisasi penggunaan



produk dalam negeri dengan menjaga kualitas. Nilai perdagangan yang daerah sampai dengan triwulan IV Rp 7.804.667.112.064.

11.1.1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 50 UMKM

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 UMKM

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 50 UMKM

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 50 UMKM

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 50 UMKM

Salah satu pendukung pertumbuhan nilai perdagangan daerah adalah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/ kota, berupa event Pasar Ramadhan yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadhan (April). Sehingga realisasi kinerja 50 UMKM yang telah dilaksanakan pada Triwulan II sehingga capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.

11.1.2 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 0 dokumen

Sub Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan merupakan sub kegiatan baru di tahun 2022, bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sub



kegiatan ini berupa pembuatan Website Pameran Virtual Produk Unggulan Daerah. Dengan adanya Pameran virtual pandemi covid-19 tidak akan menjadi penghalang untuk tetap produktif. Pameran ini menjadikan *visitor/pengunjung* dapat menjelajah dan berinteraksi dengan dunia virtual untuk merasakan *experience* pameran seperti di dunia nyata. Mempertimbangkan jumlah anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan Pameran Virtual, sub kegiatan ini tidak terealisasikan sehingga realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV masih 0%.

XII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator Kinerja	: Nilai produksi industri
Target Kinerja Tahun 2022	: Rp 1.339.000.000.000
Realisasi Kinerja Tw I 2022	: Rp 62.011.542.828 (Maret 2022)
	Rp 153.753.853.327(Januari s/d Maret)
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: Rp 89.602.195.891
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: Rp 359.142.122.973
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: Rp 1.250.342.398.086

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator nilai produksi industri yaitu Rp 1.339.000.000.000. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar Rp 1.250.342.398.086. Sehingga capaian kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 93%.

12.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	: Jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi
Target Kinerja Tahun 2022	: 60 ikm
Realisasi Kinerja Tw I 2022	: 0 ikm
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: 0 ikm
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: 0 ikm
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: 60 ikm

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mempunyai indikator kinerja jumlah industri



dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi tetapi realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV masih 60 IKM.

12.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 dokumen

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri sebanyak 1 dokumen yang telah dilaksanakan pada triwulan IV. Sehingga realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 dokumen.

12.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Target Kinerja Tahun 2022 : 8 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 4 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 6 dokumen

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri merupakan kegiatan yang berupa Pelatihan Pemasaran online Kecamatan Lumajang, Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Tempurasari, dan Kecamatan Yosowilangun, Temu Dialog Investasi Kawasan Industri Hasil Tembakau,



Kajian Masterplan DED sehingga realisasi sampai dengan triwulan IV masih 6 dokumen.

12.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 dokumen

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri merupakan kegiatan yang berupa Bimtek Peningkatan Mutu Produk Tahu Tempe, yang telah dilaksanakan pada triwulan III, sehingga realisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 dokumen.

12.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Serta Masyarakat

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 0 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 dokumen

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat terkait Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM, Pelatihan Pengelolaan Bisnis



dan Manajemen Wirausaha, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk Aneka Kripik Sentra Kec.Senduro dan Sentra Kec. Pasrujambe, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk Gula Kelapa Sentra Kec.Pasirian dan Sentra Kec. Candipuro, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk Kopi Bubuk Sentra Kec.Senduro dan Sentra Kec. Pasrujambe, Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor, Pendampingan Pengembangan Diversifikasi Produk Berbahan Baku Logam Sentra Kec. Tempeh, Pendampingan Produksi dan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi StandarKemitraan, Pengembangan Promosi Produk IKM untuk menjalin kemitraan (Kemitraan dengan Market place), Pengembangan Promosi Produk IKM untuk menjalin kemitraan (Temu Mitra), Pelatihan Kemasan, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga serta bantuan revitalisasi dapur bersih IKM, pengembangan ekonomi masyarakat berupa bantuan kemasan produk IKM. Fasilitasi ini bertujuan untuk memacu daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun global. Kemasan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai sarana promosi yang berdaya jual. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan IV, sehingga realisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 dokumen.

XIII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja	: Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI
Target Kinerja Tahun 2022	: 85%
Realisasi Kinerja Tw I 2022	: 21%
Realisasi Kinerja Tw II 2022	: 21%
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022	: 43%
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022	: 43%

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota merupakan kegiatan memfasilitasi produk IKM untuk untuk



mengantongi izin usaha. Kepemilikan izin usaha akan memberikan banyak manfaat untuk IKM. Di antaranya, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dan menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 43%.

13.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Indikator Kinerja : Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

Target Kinerja Tahun 2022 : 4 rekomendasi

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 rekomendasi

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 rekomendasi

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 2 rekomendasi

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 2 rekomendasi

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Kegiatan ini mempunyai indikator kinerja jumlah rekomendasi perolehan IUI sebanyak 4 rekomendasi. Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV adalah 2 rekomendasi.

13.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha



untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 2 dokumen

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS sebanyak 1 dokumen sedangkan realisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 2 dokumen.

13.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri



Kewenangan Kabupaten/
Kota

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 dokumen
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 dokumen
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 1 dokumen
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 dokumen.

XIV. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Kinerja : Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri
Target Kinerja Tahun 2022 : 63%
Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0%
Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 52%
Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 52%
Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 52%

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional adalah salah satu pendukung pencapaian PDRB sektor industri dimana mempunyai indikator kinerja prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri yaitu 63%. Sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 52% sehingga capaian kinerja 83%.



14.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 Dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 Dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 1 Dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 Dokumen

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota mempunyai indikator jumlah dokumen informasi industri yang tersedia sebanyak 1 dokumen. Realisasi kinerja sampai triwulan IV sebanyak 1 dokumen.

14.1.1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)

Indikator Kinerja :Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)

Target Kinerja Tahun 2022 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2022 : 0 Dokumen

Realisasi Kinerja Tw II 2022 : 1 Dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw III 2022 : 1 Dokumen

Realisasi Kinerja s.d Tw IV 2022 : 1 Dokumen

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup



Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 dokumen.

Untuk mengetahui penyerapan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Penyerapan ANggaran (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	11.683.741.939	9.905.835.125	85
2	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	12.077.324.900	10.353.972.000	86
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	4.771.880.000	3.990.353.586	84
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	6.458.262.866	3.747.079.660	58
5	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	366.262.000	300.291.404	82

Dari tabel diatas menunjukkan dengan alokasi total pagu Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan penetapan P-APBD dari Rp 33.635.022.304,- menjadi Rp 35.357.471.705,- dengan rincian serapan anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp 28.297.131.775 atau 80%.

Untuk Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat Tabel. 3.4 dibawah ini :



Tabel 3.4 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja s.d Triwulan IV (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	85	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS
2.	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	86	
3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	84	
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	58	
5.	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	82	

Dari Tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi belum dapat diukur dikarenakan capaian kinerja belum dapat diukur.

Dari Penjabaran diatas dapat diketahui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2022 berdasarkan target indikator kinerja program Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
 1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
 1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 2. Program Pengembangan Ekspor
 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 5. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 6. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
10. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
11. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Hasil evaluasi 14 program yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh :

1. Target capain kinerja terlalu tinggi dibanding dengan anggaran yang ada.
2. Terbatasnya anggaran menjadikan target lokasi pelayanan tera / tera ulang menurun dari tahun sebelumnya sehingga pelayanan difokuskan pada pasar rakyat di masing - masing Kecamatan yang menjadikan cakupan jumlah WTU dan UTTP menjadi berkurang.
3. Ketersediaan anggaran hanya untuk membayar tenaga kontrak bulanan. Sehingga pengawasan untuk perusahaan sangat terbatas, pengawasan yang dilakukan bebarengan dengan pelaksanaan tera / tera ulang dan hanya mencakup pengguna UTTP / WTU yang ada di pasar rakyat.
4. Kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait pengendalian izin usaha
5. Sering berubahnya regulasi/peraturan terkait perizinan usaha

Analisis Tantangan serta Solusi Permasalahan

Dalam pencapaian sasaran pembangunan tidak lepas dari berbagai tantangan khususnya pada bidang koperasi, bidang perdagangan dan metrologi legal, dan industri dan usaha mikro yaitu :

1. Kurangnya personil dalam pelaksanaan monitoring dan verifikasi lapangan.
2. Kurangnya kesadaran koperasi untuk melakukan RAT secara tepat waktu.
3. Kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait pengendalian izin usaha serta sering berubahnya regulasi/peraturan terkait perizinan usaha.
4. Kesadaran pelaku usaha atas kewajiban menyampaikan data industri masih sangat kurang



Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang mengambil langkah - langkah kedepan untuk meminimalisir tantangan tersebut melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Personil cadangan untuk menggantikan personil yang berhalangan hadir karena benturan jadwal kegiatan
2. Sosialisasi ke koperasi secara kontinue agar Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilaksanakan tepat waktu.
3. Sosialisasi regulasi/peraturan terbaru terkait izin usaha industri.
4. Pelaksanaan sosialiasasi terkait pentingnya penyampaian data industri.

b. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Bupati Lumajang. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, maka pada tahun anggaran 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang mendapatkan alokasi anggaran setelah *perubahan APBD* yaitu sebesar Rp. 35.147.571.705 yang digunakan untuk melaksanakan 14 program meliputi 22 kegiatan 48 sub kegiatan.

Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN IV	CAPAIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	23.761.066.839	20.259.407.125	85%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.156.782.089	9.396.694.275	84%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.591.250	7.520.000	99%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.330.000	3.315.500	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.190.000	2.184.000	100%



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN IV	CAPAIAN
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	871.250	820.500	94%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.117.600.319	7.418.626.355	81%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.069.486.319	7.370.512.355	81%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.330.000	43.330.000	100%
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.784.000	4.784.000	100%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.756.000	17.736.000	100%
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.756.000	13.736.000	100%
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000	4.000.000	100%
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	4.998.000	100%
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	5.000.000	4.998.000	100%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.514.070	310.183.051	99%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.020.090	7.013.250	100%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.661.330	84.128.920	98%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.112.050	58.547.550	97%
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	4.560.600	4.560.600	100%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.160.000	155.932.731	100%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.999.970	29.999.300	100%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.999.970	29.999.300	100%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.239.402.280	1.188.838.071	96%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.035.000	2.993.000	99%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.612.080	293.523.724	90%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	911.755.200	892.321.347	98%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.918.200	418.793.498	98%



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN IV	CAPAIAN
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.868.200	284.049.798	98%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.050.000	70.025.000	100%
1.8.3	Pemeliharaan Aset tak berwujud	50.000.000	50.000.000	100%
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.718.700	98%
II	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.400.000	32.400.000	100%
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	32.400.000	32.400.000	100%
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.400.000	26.400.000	100%
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000	6.000.000	100%
III	Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi	75.360.000	66.110.000	88%
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	75.360.000	66.110.000	88%
31.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	52.800.000	43.550.000	82%
3.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.560.000	22.560.000	100%
IV	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	404.200.000	395.231.000	98%
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	404.200.000	395.231.000	98%
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000	395.231.000	98%
V	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	14.999.850	14.999.850	100%
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	14.999.850	14.999.850	100%



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN IV	CAPAIAN
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.850	14.999.850	100%
VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	12.077.324.900	10.353.972.000	86%
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12.077.324.900	10.353.972.000	86%
6.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.077.324.900	10.353.972.000	86%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.138.142.000	4.290.644.990	84%
VII	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.591.900.000	3.811.843.416	83%
7.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.888.900.000	3.111.843.416	80%
7.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.564.900.000	1.788.514.416	70%
7.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.324.000.000	1.323.329.000	100%
7.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	703.000.000	700.000.000	100%
7.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	703.000.000	700.000.000	100%
VIII	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	37.690.000	34.840.000	92%
8.1	Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	7.690.000	5.290.000	69%
81.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.090.000	4.090.000	100%
8.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.600.000	1.200.000	33%
8.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	29.550.000	99%
8.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	29.550.000	99%



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN IV	CAPAIAN
IX	Program Pengembangan Ekspor	179.980.000	178.510.170	99%
9.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	179.980.000	178.510.170	99%
9.1.1	Pameran Dagang Nasional	100.000.000	99.943.020	100%
9.1.2	Pameran Dagang Lokal	60.000.000	59.736.150	100%
9.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	19.980.000	18.831.000	94%
X	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	163.572.000	163.148.204	100%
10.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	163.572.000	163.148.204	100%
10.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	146.572.000	146.148.204	100%
10.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.000.000	17.000.000	100%
XI	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	165.000.000	102.303.200	62%
11.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	165.000.000	102.303.200	62%
11.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120.000.000	102.303.200	85%
11.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	45.000.000	0	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.458.262.866	3.747.079.660	58%
XII	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.434.033.116	3.723.329.510	58%
12.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6.434.033.116	3.723.329.510	58%
12.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	100%
12.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	329.999.480	111.804.430	34%
12.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	27.000.000	26.776.400	99%
12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.002.033.636	3.509.748.680	58%
XIII	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	15.749.750	15.418.150	98%
13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	15.749.750	15.418.150	98%



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI s.d TRIWULAN IV	CAPAIAN
	Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.749.750	15.418.150	98%
13.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
XIV	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.480.000	8.332.000	98%
14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	8.480.000	8.332.000	98%
14.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8.480.000	8.332.000	98%
JUMLAH		35.357.471.705	28.297.131.775	80%



LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV 2022 dengan Anggaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	187.163.473.963	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	11.683.741.939	9.905.435.125	85	Belum dapat diukur
2	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.386.052.733.457	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	12.077.324.900	10.353.972.000	86	Belum dapat diukur
3	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.354.259.412.080	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	4.771.880.000	3.990.353.586	84	Belum dapat diukur
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.838.025.215.520	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	6.458.262.866	3.747.079.660	58	Belum dapat diukur

5	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	21.843.136,20	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	366.262.000	300.291.404	82	Belum dapat diukur
---	-----------------------------------	----------------------------	---------------	---	--------------------	-------------	-------------	----	--------------------

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan IV 2022



Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel diatas ditetapkan untuk sasaran strategis kualitas Perdagangan masyarakat tingkat efisiensinya belum dapat diukur karena menunggu release data PDRB dari Badan Pusat Statistik. Adapun realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan IV pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	Nilai PDRB sektor Koperasi	187.163.473.963	Menunggu data BPS		23.761.066.839	20.259.407.125	85%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100 %	100	100	11.156.782.089	9.396.694.275	84%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	106	106	7.591.250	7.520.000	99%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 doku men	3	150	3.330.000	3.315.500	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 doku men	1	100	2.190.000	2.184.000	100%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5	100	871.250	820.500	94%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8	100	1.200.000	1.200.000	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100	9.117.600.319	7.418.626.355	81%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang /12 bulan	84	84	9.069.486.319	7.370.512.355	81%
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12	100	43.330.000	43.330.00	100%
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	100	4.784.000	4.784.000	100%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	100	100	17.756.000	17.736.00	100%
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1	100	13.756.000	13.736.00	100%
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4	100	4.000.000	4.000.000	100%
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Percentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 %	100	100	5.000.000	4.998.000	100%
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah	2 dokumen	2	100	5.000.000	4.998.000	100%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %	101	101	313.514.070	310.183.051	99%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	100	7.020.090	7.013.250	100%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	4	133	85.661.330	84.128.920	98%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3	150	60.112.050	58.547.550	97%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1	100	4.560.600	4.560.600	100%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	90	100	156.160.000	155.932.731	100%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %	100	100	29.999.970	29.999.300	100%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan kantor yang disediakan	1 unit	1	100	29.999.970	29.999.300	100%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	100	100	1.239.402.280	1.188.838.071	96%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12	100	3.035.000	2.993.000	99%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12	100	324.612.080	293.523.724	90%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12	100	911.755.200	892.321.347	98%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	100	100	425.918.200	418.793.498	98%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	83 unit	83	100	290.868.200	284.049.798	98%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 unit	134	100	70.050.000	70.025.000	100%
1.8.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	1	100	50.000.000	50.000.000	100%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhap	1 unit	1	100	15.000.000	14.718.700	98%
II	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	82 %	136	166	32.400.000	32.400.000	100%
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	35 koperasi	58	166	32.400.000	32.400.000	100%
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 unit usaha	58	166	26.400.000	26.400.000	100%
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	250 unit usaha	296	118	6.000.000	6.000.000	100%
III	Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat	81 %	21	26	75.360.000	66.110.000	88%
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat	70 koperasi	18	26	75.360.000	66.110.000	88%
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200 unit usaha	75	38	52.800.000	43.550.000	82%
3.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	4 unit usaha	8	200	22.560.000	22.560.000	100%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
IV	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan Koperasi	85 %	85	100	404.200 .000	395.231. 000	98%
4. 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	280 orang	280	100	404.200 .000	395.231. 000	98%
4.1. 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	280 orang	280	100	404.200 .000	395.231. 000	98%
V	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	80 %	80	100	14.999. 850	14.999.8 50	100%
5. 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	200 orang	200	100	14.999. 850	14.999.8 50	100%
5.1. 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 orang	200	100	14.999. 850	14.999.8 50	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN USAHA MIKRO	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.38 6.052. 733.4 57 rupiah	Menunggu data BPS	0%	12.077. 324.900	10.353.9 72.000	86%
VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	75 %	64	85	12.077. 324.900	10.353.9 72.000	86%
6. 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro	210 usaha mikro	178	85	12.077. 324.900	10.353.9 72.000	86%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capai a n (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capai a n (%)
	melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
6.1. 1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	210 unit usaha	178	85	12.077.324.900	10.353.972.000	86%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.354.259.412.080 rupiah	Menunggu data BPS		4.771.880.000	3.990.353.586	84%
		Nilai Pendapatan Perkapita	21.843.136,20 rupiah	Menunggu data BPS		366.262.000	300.291.404	82%
VII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai retribusi pelayanan pasar	8.078.276.300 rupiah	7.775.324.776,25	96	4.591.900.000	3.811.843.416	83%
7.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	prosentase sarana yang dibangun/direhab	16,67 %	13,68	82	3.888.900.000	3.111.843.416	80%
7.1. 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30 unit	29	97	2.564.900.000	1.788.514.416	70%
7.1. 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30 unit	29	97	1.324.000.000	1.323.329.000	100%
7.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diWilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola pasar yang dibina	64 orang	64	100	703.000.000	700.000.000	100%
7.2. 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	12	100	703.000.000	700.000.000	100%
VII I	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	80 %	78	97	37.690.000	34.840.000	92%
8. 1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang	13 barang	13	100	7.690.000	5.290.000	69%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaiannya (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaiannya (%)	
	dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	dikendalikan							
81.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	12	100	4.090.000	4.090.000	100%	
8.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	4	100	3.600.000	1.200.000	33%	
8.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	84 kios	84	100	30.000.000	29.550.000	99%	
8.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 laporan	2	100	30.000.000	29.550.000	99%	
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	• Nilai Eksport • Nilai Perdagangan Antar Daerah	* 950.000.000 * 4.080.000.000 0	rupiah * 1.129.658. * 143.806 * 5.694.871. 879.432	* 119 * 140	179.980.000	178.510.170	99%	
9.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	nilai omset promosi dagang	200.000.000	rupiah 210.127.000	105	179.980.000	178.510.170	99%	
9.1.1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30	pelaku usaha	30	100	100.000.000	99.943.020	100%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
9.1.2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 pelaku usaha	25	83	60.000.000	59.736.150	100%
9.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 pelaku usaha	4	133	19.980.000	18.831.000	94%
X	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang	82 %	41	50	163.572.000	163.148.204	100%
10.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang	175.000.00 rupiah	161.848.800	92	163.572.000	163.148.204	100%
10.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18.794 UTTP	9.415	50	146.572.000	146.148.204	100%
10.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 WTU	519	173	17.000.000	17.000.000	100%
XI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah	4 %	11	274	165.000.000	102.303.200	62%
11.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Perdagangan Daerah	7.280.000.000 rupiah	7.804.667.112.064	107	165.000.000	102.303.200	62%
11.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	50	100	120.000.000	102.303.200	85%
11.1.2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	-	0	45.000.000	0	0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Nilai PDRB Sektor Industri	4.838.025.215.520 rupiah	Menunggu data BPS		6.458.262.866	3.747.079.660	58%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai produksi industri	1.339.000.000	rupiah 1.250.342.398.086	93	6.434.033.116	3.723.329.510	58%
12 .1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi	60 IKM	ikm	60	100	6.434.033.116	3.723.329.510
12. 1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	1	100	75.000.000	75.000.000
12. 1.2	Koordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8	dokumen	6	75	329.999.480	111.804.430
12. 1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	dokumen	1	100	27.000.000	26.776.400
12. 1.4	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	dokumen	1	100	6.002.033.636	3.509.748.680
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI	85	%	43	50	15.749.750	15.418.150
13. 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4	rekomendas i	2	50	15.749.750	15.418.150



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secaraElektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	2	200	15.749.750	15.418.150	98%
13.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1	100	0	0	0
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri	63 %	52	83	8.480.00	8.332.00	98%
14.1.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia	1 dokumen	1	100	8.480.00	8.332.00	98%
14.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	1 dokumen	1	100	8.480.00	8.332.00	98%



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
	Lingkup Kabupaten /Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)						
	JUMLAH					35.357. 471.705	28.297.1 31.775	80%



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023. Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis/RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, yaitu nilai PDRB sektor koperasi, nilai PDRB sektor usaha mikro, PDRB sektor industry, sektor perdagangan nilai dan nilai pendapatan perkapita belum dapat diukur dikarenakan data tersebut menunggu release dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang.

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan masih perlu diambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja. Langkah tersebut antara lain dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan nilai perdagangan daerah, memfasilitasi pelaku IKM agar produk IKM mampu berdaya saing sehingga dapat meningkatkan PDRB sektor perindustrian, meningkatkan pertumbuhan jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang, merehabilitasi sarana, dan prasarana perdagangan serta sosialisasi ke koperasi secara kontinue agar Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilaksanakan tepat waktu.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan laporan kinerja ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.